



Pusatkan Penanganan Covid di Satu RS

JOGJA—Pemda DIY diminta untuk memusatkan penanganan pasien Covid-19 di satu rumah sakit saja. Pemusatan di satu RS sejalan dengan upaya menguransi transmisi Covid-19, dan menjaga agar layanan kesehatan baik untuk pasien Covid maupun reguler bisa tetap berjalan maksimal.

Lugas Subarkah, Catur Dwi Jenati,
& Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com

Usulan itu disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Ova Amelia.

Menurutnya, untuk penanganan pasien Covid-19 yang lebih efektif, Pemda DIY semestinya memusatkan pelayanan Covid-19 di satu rumah sakit yang memang dikhususkan untuk keperluan tersebut dan tidak melayani pasien non-Covid-19.

► Rumah sakit yang sesuai untuk dijadikan pusat penanganan covid-19 yakni RSPAU Hardjolukito dan Rumah Sakit Akademik UGM.

► Problem yang belum terpecahkan dalam penambahan *bed* perawatan khusus pasien Covid-19, lagi-lagi soal ketersediaan tenaga kesehatan.

Saat ini, Pemda DIY menyediakan 27 rumah sakit rujukan untuk merawat pasien Covid-19. "Dalam upaya memitigasi transmisi (penularan), ini [RS rujukan yang terlalu banyak] menjadi kontraproduktif," kata Ova, Selasa (19/1).

Ia mencontohkan RS terpusat yang fokus menangani pasien Covid-19 itu seperti Wisma Atlet di DKI Jakarta yang memiliki konsep tersentral dan manajemen yang ketat. "Yang terjadi sekarang 27 rumah sakit, diminta meningkatkan kapasitasnya, tetapi standarnya tidak memenuhi syarat yang sesungguhnya," ungkapnya.

► Halaman 10



Kepala

Pusatkan Penanganan...

Pemusatan rumah sakit ini menurutnya tidak bisa dilakukan di RSUD Prof. dr. Sardjito, karena rumah sakit tersebut ditungsi untuk rujukan teratas baik Covid-19 yang kritis, maupun pasien non-Covid-19. Menurut dia, rumah sakit yang sesuai untuk dijadikan pusat penanganan covid-19 yakni RSPAU Hardjolutito, dan Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM.

"Dua rumah sakit ini ditunjuk tapi betul-betul didukung oleh pemerintah. Artinya, SDM-nya dikontribusi oleh semua rumah sakit yang ada di DIY, sehingga dua rumah sakit berjalan bukan hanya oleh orang-orang yang hanya jadi stafnya Hardjolutito dan RSA saja. Ada 70 sekian rumah sakit di DIY. Yang bisa memobilisasi ini pemerintah," ungkapnya.

Peningkatan kapasitas di 27 rumah sakit juga sebaiknya dievaluasi apakah bisa mengurangi jumlah kematian. Berdasarkan catatan Ova, pasien Covid-19 yang menunggu antrean untuk masuk ke rumah sakit, sebanyak 12 di antaranya meninggal karena tidak segera mendapat pelayanan. "Artinya ada [penanganan] yang tidak benar. Yang kami lihat jumlah kematian tetap. *ngomongnya* sudah dinaikkan kapasitasnya [bed]. Kan berarti ada sesuatu yang harus kita ubah," katanya.

Menanggapi usulan ini, Sekda DIY Kadarman Baskara Aji, mengatakan pemusatan rumah sakit untuk Covid-19 merupakan usulan cukup bagus. Namun untuk hal itu, perlu komitmen bersama, bukan hanya ditentukan satu pihak misalnya Dinas Kesehatan saja, tetapi rumah sakit yang bersangkutan juga harus punya komitmen yang sama.

"Kalau rumah sakit itu hanya melayani Covid-19, dari rumah sakit reguler beberapa yang sempat kami ajak bicara masih belum memungkinkan. Sebetulnya ideal seperti Jakarta punya Wisma Atlet. Namun mereka punya nakes, peralatan lengkap, untuk dipindahkan ke sana. Kita, terutama, masih kesulitan soal nakes," ungkapnya.

Koordinasi Daerah

Saat ini, Pemda DIY masih menempuh upaya menambah bed perawatan pasien Covid-19 sejumlah RS rujukan. Baskara Aji mengatakan Pemda DIY telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta rumah sakit untuk menambah alokasi bed untuk pasien Covid-19. Saat ini, sedang dilakukan konfirmasi di masing-masing rumah sakit jumlah bed yang ditambahkan.

Baskara mengatakan Dinas Kesehatan DIY telah menyampaikan laporan penambahan bed di rumah sakit, tetapi belum bisa dipublikasikan. "Mau dikonfirmasi ke rumah sakit yang bersangkutan supaya kami punya data yang jelas. Tapi memang sudah ada data yang masuk, semua kabupaten kota akan menambah bed," katanya.

Untuk mendapatkan data yang lebih *update* terkait ketersediaan bed, Dinas Kesehatan DIY kata dia, akan mengaktifkan aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Hal ini untuk menghindari *update* data ketersediaan bed satu hari sekali, di

mana sering memberikan gambaran yang salah. "Kami berharap SPGDT yang bisa mengakses akun di layanan kesehatan terutama di puskesmas. Sehingga kalau ada seseorang yang sakit silakan datang ke puskesmas. Maka puskesmas itu yang punya data terhadap ketersediaan rumah sakit, atau cukup isolasi diri, yang menentukan adalah puskesmas," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembantu Setyaningastute, mengatakan penambahan bed konsekuensinya adalah penambahan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, Dinas Kesehatan DIY mengupayakan penambahan SDM dengan tiga jalur. Pertama meminta Kementerian Kesehatan dengan Relawan Nusantara Sehat "Kedua masing-masing rumah sakit berupaya merekrut SDM secara mandiri. Ketiga, berupaya menjajaki untuk rekrut lagi, seperti kemarin kan sudah kami lakukan. Tapi nyatanya sedikit sekali yang berminat. Ini juga menjadi satu hal yang kami rencanakan," ujarnya.

Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo mengatakan ada sejumlah upaya yang akan dilakukan Dinkes untuk mengatasi kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19. "Besok [hari ini] kami akan membahasnya dengan rumah-rumah sakit," kata Joko.

Menurut Joko, Dinkes sebelumnya telah mengedarkan surat edaran agar rumah-rumah sakit rujukan Covid-19 di Sleman dapat menambah kapasitas ruang isolasi minimal 30% dari kapasitas total bed yang dimiliki. Surat edaran tersebut sesuai arahan Menteri Kesehatan. Sejauh ini, kata Joko, ada tiga rumah sakit yang menambah kapasitas bed yang bisa digunakan pasien Covid-19, meliputi RSUD Prof Dr Sardjito, RSA UGM, dan RSUD Sleman.

"RSUD Sleman sebelumnya hanya memiliki 22 kamar nonkritikal dan satu kamar kritikal. Saat ini jumlahnya ditambah menjadi 30 kamar nonkritikal dan dua kamar kritikal," katanya.

Dinkes juga akan mendorong percepatan pengoperasian rumah sakit lapangan darurat Covid yang rencananya dibangun di Kapanewon Moyudan. RS tersebut dibangun laiknya RS kelas D yang dapat melakukan persalinan untuk pasien Covid, normal maupun dengan penyakit lainnya.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. RSUD (RS Jogja)			

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005